

PEMBERDAYAAN MITRA BINAAN UMKM MELALUI PROGRAM COMMUNITY DEVELOPMENT PT TELKOM KANDATEL BANDUNG

Oleh :

Iwa Suryatna

ABSTRAK

Program Kemitraan PT Telkom adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba PT Telkom. Kemitraan melalui BUMN belum mampu memberikan stimulus usaha yang kondusif bagi usaha kecil. Keberadaan BUMN ternyata hanya mengkonsentrasikan pada penyaluran dana yang menjadi kewajibannya. Di lain pihak, pendampingan dan pembinaan tidak optimal dilakukan. Tidak hanya itu, transparansi penyaluran anggaran ini juga masih banyak yang menggugat. Masalah transparansi anggaran dalam kerja sama kemitraan ini lebih banyak ditekankan pada jumlah alokasi dan ketepatan sasaran UKM penerima dana. Berdasarkan karakteristik penelitian yang menjelaskan pengaruh variabel serta pengujian hipotesis antara variabel-variabel yang ada dengan menggunakan teknik sampling, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, secara lebih spesifik menggunakan metode survei eksplanatif (*explanatory survey*). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya yaitu : komunikasi dari implementasi program kemitraan berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan usaha kecil yang ditentukan oleh sosialisasi, kejelasan informasi, konsistensi informasi, frekwensi komunikasi, dan lapisan komunikasi. Berdasarkan hasil angket, sebagian besar berpendapat bahwa pelaksanaan program kemitraan pada sub variabel komunikasi berjalan baik, hanya saja masalah frekuensi penyampaian informasi yang masih kurang dan informasi yang sampai pada pengusaha kecil tidak secara langsung melainkan melalui beberapa orang atau lembaga.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Community Development, PT Telkom

A. PENDAHULUAN

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan sektor tangguh dalam perekonomian nasional, meski perlindungan pemerintah kepada usaha kecil tidak sebesar yang diberikan kepada pemodal besar. Menurut Anwar Sanusi (2004:48) yang dimuat Jurnal Humaniora menyebutkan bahwa UKM menjadi fundamen ekonomi nasional sesungguhnya. Saat perusahaan besar dan perbankan kolaps akibat krisis ekonomi tahun 1997 yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) skala besar serta divestasi modal ke luar negeri. UKM tetap bertahan dengan stabil di tengah krisis ekonomi tersebut, bahkan menopang keruntuhan perusahaan besar dengan penyerapan pengangguran akibat PHK serta mempertahankan produktivitas masyarakat.

Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam konstelasi perekonomian nasional telah menjadi salah-satu sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016-2018, peranan UKM menunjukkan peningkatan yang

signifikan tiap tahunnya terhadap kontribusi pendapatan nasional serta penyediaan lapangan kerja. Pada tahun 2017, jumlah UKM sebesar 48.936.636 unit usaha yang terdiri dari 48.822.926 unit usaha kecil dan 106.711 unit usaha menengah telah menyerap lebih dari 85.416.493 tenaga kerja. Jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja ini rata-rata per tahunnya meningkat masing-masing 3,88 persen. Kontribusi UKM pada Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2017 sebesar 7,17%. Untuk menggambarkan secara jelas perkembangan kontribusi UKM pada ekonomi nasional dipaparkan dalam Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1
Perkembangan Umum UKM Tahun 2014-2017

Jenis Perkembangan	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Unit Usaha	41.763.433 unit	43.707.412 unit	47.102.744 unit	48.936.636 unit
Tenaga Kerja	73.967.653 orang	75.490.523 orang	83.233.793 orang	85.416.493 orang
PDB	1.087.764 milyar	1.387.099 milyar	1.491.061 milyar	1.773.745,7 milyar
Investasi	239.679.385 juta	258.457.937 juta	302.499.467 juta	369.823.463 juta

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2014-2017

Perkembangan kuantitas tersebut belum diimbangi oleh perkembangan kualitas UKM yang masih menghadapi permasalahan klasik yaitu rendahnya produktivitas. Pada tahun 2017, Produktivitas tenaga kerja usaha kecil hanya mencapai Rp 2.600.000,00 per tenaga kerja, sedangkan usaha menengah sebesar Rp 8.700.000,00 per tenaga kerja. Angka tersebut sangat jauh tertinggal dibandingkan produktivitas tenaga kerja usaha besar yang mencapai Rp 1,8 miliar per tenaga kerja.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (2016:37-38), masalah produktivitas UKM berkaitan erat dengan:

1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia terutama dalam penguasaan manajemen, teknologi, dan pemasaran.
2. Lemahnya kompetensi kewirausahaan
3. Terbatasnya kapasitas UKM untuk mengakses permodalan, informasi teknologi dan pasar, serta faktor produksi lainnya.

Selain itu, terdapat beberapa masalah yang bersumber dari lingkungan luar atau eksternal UKM, antara lain (Direktorat Pemberdayaan UMKM, 2016:40-43):

1. Besarnya biaya transaksi akibat kurang kondusifnya iklim usaha.
2. Praktik persaingan usaha yang tidak sehat dan
3. Keterbatasan informasi dan jaringan pendukung usaha.

Secara umum, kemampuan UKM untuk meningkatkan produktifitasnya sangat ditentukan oleh dua kondisi utama yang perlu dipenuhi. Pertama, lingkungan internal UKM harus kondusif, mencakup aspek kualitas sumberdaya manusia, penguasaan teknologi dan informasi, struktur organisasi, sistem manajemen, budaya usaha, kekuatan

modal, jaringan bisnis dengan pihak luar, dan tingkat kewirausahaan (*entrepreneurship*). Kedua, lingkungan eksternal harus juga kondusif, yang terkait dengan kebijakan pemerintah, aspek hukum, kondisi persaingan pasar, kondisi ekonomi-sosial-kemasyarakatan, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat, dan perubahan ekonomi global.

Kebijakan pemerintah mengenai pemberdayaan usaha skala kecil dan menengah (UKM) merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari bagian terbesar rakyat Indonesia. Kebijakan umum yang sedang dilaksanakan pemerintah untuk memberdayakan UKM meliputi:

1. Kebijakan penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam rangka membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, menjamin adanya kepastian usaha, dan meningkatkan efisiensi ekonomi sebagai prasyarat utama untuk berkembangnya UKM.
2. Kebijakan peningkatan akses kepada sumberdaya produktif untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil, menengah dalam memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia.
3. Kebijakan pengembangan keunggulan kompetitif dan kewirausahaan bagi pengusaha kecil dan menengah dalam rangka mengembangkan perilaku kewirausahaan serta meningkatkan daya saing UKM.

Dalam rangka peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan mendukung peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah, pemberdayaan usaha kecil utamanya difokuskan untuk mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin, yaitu melalui kegiatan prioritas seperti:

1. Memperluas jangkauan dan kapasitas pelayanan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) baik pola pembiayaan konvensional maupun pola bagi hasil/syariah, termasuk dengan memberdayakan perempuan sebagai pengusaha kecil.
2. Meningkatkan kemampuan pengusaha kecil dalam aspek manajemen usaha dan teknis produksi.
3. Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana usaha kecil dan
4. Memfasilitasi pembinaan sentra-sentra produksi tradisional dan usaha ekonomi produktif lainnya di perdesaan dan daerah tertinggal.

Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah tersebut belum menghasilkan dampak yang optimal bagi perkembangan usaha kecil. Selama itu, pengusaha kecil masih merasakan kesulitan dalam mengakses kebijakan-kebijakan pemberdayaan usaha kecil. Hal tersebut disebabkan sosialisasi program-program yang tidak menyentuh usaha kecil, proses keterlibatan yang masih bernuansa kolusif, persyaratan yang sulit dipenuhi serta berbagai izin usaha yang masih menghambat. Disamping itu, pelaksana kebijakan yaitu birokrasi pemerintah seringkali menghambat efektifitas dan efisiensi kebijakan tersebut.

Berkaitan dengan masalah implementasi kebijakan pemberdayaan usaha kecil ditemukan beberapa fakta penghambat. Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan pengembangan usaha kecil terhadap kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Cianjur yang dilakukan Hermin Patriana (2005:i) bahwa masih terdapat kendala komunikasi dalam implementasi kebijakan usaha kecil dimana terdapat disiplin rendah dan pemahaman tugas serta tanggung jawab yang kurang dari petugas pelaksana kebijakan. Berkaitan dengan masalah kebijakan pemberdayaan usaha kecil,

Menteri Koordinator bidang perekonomian pada masa itu, Boediono mengakui bahwa tidak semua implementasi dari paket kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah akan memenuhi target waktu yang ditetapkan. Penyebabnya adalah panjangnya birokrasi yang harus ditempuh (Kompas, 15 Juni 2007).

Pada tingkat nasional, pemberdayaan usaha kecil berada dalam otoritas Kementerian (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi) UMKMK yang mempunyai tugas dan fungsi utama dalam menjalankan berbagai kebijakan, program serta aktivitas pemberdayaan UKM. Untuk memperluas cakupan pemberdayaan UKM serta untuk memberdayakan potensi-potensi yang tersedia, maka pemerintah melibatkan berbagai lembaga baik pemerintah atau swasta serta kelembagaan perbankan dalam mengoptimalkan program pemberdayaan UKM. Kementerian Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara sebagai lembaga yang menaungi perusahaan-perusahaan BUMN diberikan tanggung jawab dalam pemberdayaan UKM berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan negara dengan kapasitas finansial yang dimilikinya. Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan produktivitas masyarakat dan pengurangan pengangguran serta sekaligus membentuk pelaku usaha untuk mampu bersaing dalam pasar global dan dinamika perubahan situasi dalam negeri, maka menurut Bambang S. Sumantri, pengembangan UKM perlu mempertimbangkan aspek potensial yang salah satunya adalah perluasan sumber permodalan UKM yang memiliki kapasitas dukungan lebih besar seperti perbankan, perusahaan besar baik swasta ataupun BUMN (Kompas, Kamis 12 Mei 2005).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah-satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional disamping swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi. Disamping menghasilkan barang dan jasa untuk memakmurkan masyarakat, BUMN dipandang memiliki peran yang strategis dalam membantu pembinaan dan pengembangan usaha swasta dan koperasi, khususnya yang usaha-usaha kecil. Oleh karena itu, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 3/1983 telah mengamanatkan BUMN untuk turut serta membantu pengembangan usaha kecil. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah tersebut, telah diterbitkan kebijakan turunan sebagai pedoman pelaksanaan pembinaan usaha kecil, yaitu Keputusan Menteri Pendayagunaan BUMN Nomor. 197/M-PBUMN/1997 dan Nomor 216/M-PBUMN/1997. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat yang sangat dinamis, pedoman yang telah diterbitkan tersebut belum dapat memenuhi harapan masyarakat pelaku usaha kecil dan kebutuhan pelaksanaan dan pengelolaan program. Atas dasar pertimbangan tersebut maka pemerintah Kementerian BUMN memandang perlu menerbitkan Keputusan Menteri BUMN Nomor. 236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) yang salah-satu aspek utamanya mengatur operasionalisasi program kemitraan BUMN dengan usaha kecil yang lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kondisi lingkungan sosial masyarakat. Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Pelaksanaan program kemitraan BUMN sampai saat ini masih menghadapi beberapa permasalahan berkaitan dengan tidak efektifnya program tersebut terhadap

pemberdayaan usaha kecil. Berdasarkan pernyataan Sekretaris Kementerian BUMN, Barcelius Ruru yang dikutip dalam harian Kompas tanggal 28 Agustus 2007 bahwa program kemitraan BUMN dengan usaha kecil belum dilaksanakan secara optimal karena perusahaan-perusahaan BUMN masih terhambat anggapan bahwa program kemitraan tersebut sebagai tugas tambahan. Indikator hambatan pelaksanaan program tersebut didasarkan masih kecilnya proporsi pembinaan usaha kecil oleh perusahaan BUMN, jumlah unit usaha yang telah mendapatkan bantuan BUMN hanya sekitar 0,9 persen, dari sekitar 40 juta unit usaha kecil dan menengah. Berdasarkan tulisan AA Ngurah Alit Wira Putra yang dimuat dalam Harian Kompas, 23 Juli 2006 bahwa menurut pernyataan dari beberapa pelaku usaha di Jawa Barat yang menilai bahwa pola kemitraan tergolong tidak berhasil akibat kentalnya nuansa politis serta ketakutan akan kesenjangan sosial yang lebih tinggi. Sebagai contoh, banyak pelaku usaha kecil mengeluhkan faktor permodalan dalam kemitraannya dengan BUMN. Kewajiban BUMN yang mengalokasikan 1% - 3% laba setelah pajak untuk UKM masih setengah hati, hanya untuk memenuhi tuntutan perundangan yang berlaku.

Kemitraan melalui BUMN belum mampu memberikan stimulus usaha yang kondusif bagi usaha kecil. Keberadaan BUMN ternyata hanya mengkonsentrasikan pada penyaluran dana yang menjadi kewajibannya. Di lain pihak, pendampingan dan pembinaan tidak optimal dilakukan. Tidak hanya itu, transparansi penyaluran anggaran ini juga masih banyak yang menggugat. Masalah transparansi anggaran dalam kerja sama kemitraan ini lebih banyak ditekankan pada jumlah alokasi dan ketepatan sasaran UKM penerima dana. Jumlah alokasi yang direncanakan tidak sepenuhnya tersalurkan semua. Implementasi program kemitraan BUMN hingga November 2017 masih jauh dari optimal. Dari kelompok BUMN, Kakunas, ventura, dan lainnya, yang memiliki komitmen untuk mengalokasikan dana senilai Rp 8,57 milyar hanya teralisasi Rp 7,46 milyar. Estimasi data tahun 2018, paling tidak menjadi acuan untuk estimasi saat ini. Salah seorang staf ahli kementerian UMKMK menyatakan bahwa jumlah alokasi anggaran BUMN untuk usaha kecil tidak semuanya tersalurkan sesuai dengan ketentuan. Kemudian menyangkut aspek ketepatan sasaran penerima dana BUMN, terjadi ketimpangan praktik kemitraan. Saat ini masih banyak usaha yang tidak semestinya mendapat suntikan anggaran malah mendapat porsi sebagai mitra BUMN.

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) merupakan salah-satu perusahaan BUMN yang menjalankan program kemitraan. Salah-satu prestasi yang dicapai oleh PT Telkom dalam program kemitraan adalah *Corporate Social Responsibility Award 2016* dengan mengkontribusikan pelayanan tanggung jawab sosialnya secara sungguh-sungguh dengan mewujudkan *good corporate citizenship* yang diberikan oleh *Corporate Forum Community Development (CFCD)*. Program Kemitraan PT Telkom adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba PT Telkom. Program kemitraan PT Telkom ini telah berjalan sejak tahun 2003 didasarkan pada Keputusan Direksi PT Telkom No. 51/KU200/PUK-00/2003 yang berlandaskan Kepmen 236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program kemitraan PT Telkom dijalankan oleh sebuah badan khusus yaitu *Central Community Development (CDC)* yang mempunyai struktur sendiri sampai pada tingkat daerah (Kantor Daerah Telkom/Kandatel). Lingkup wilayah binaan program kemitraan PT Telkom mencakup wilayah yang menjadi wilayah operasional PT Telkom yang saat ini telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Salah-satu wilayah yang menjadi implementasi program kemitraan usaha kecil PT Telkom adalah Kota Bandung.

Berdasarkan pelaksanaan program kemitraan PT. Telkom di wilayah Bandung sejak tahun 2014 sampai tahun 2017, Kantor Daerah (Kandatel) Telkom Bandung telah melakukan kemitraan usaha dengan sekitar 1500 usaha kecil di wilayah Bandung dan sekitarnya yang terdiri dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang. Program kemitraan ini melibatkan beberapa bidang usaha kecil yang terdiri dari bidang usaha industri, perdagangan, jasa, pertanian dan peternakan. Berdasarkan data Kemitraan Kandatel Bandung, tahun 2017 sampai saat ini telah terjalin kemitraan seperti yang dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 2

Jumlah dan Jenis Mitra Binaan Kandatel Bandung

No	Jenis Usaha	Jumlah Unit Usaha
1	Usaha kecil bidang industri	525
2	Usaha kecil bidang perdagangan	420
3	Usaha kecil bidang jasa	375
4	Usaha kecil bidang pertanian	90
5	Usaha kecil bidang peternakan	75
Total Mitra Binaan		1500

Sumber : Laporan Program Kemitraan CDC Kandatel Bandung

Khusus di Kota Bandung, Kandatel Bandung telah menjalankan program kemitraan dengan 781 usaha kecil sejak tahun 2003. Penelitian ini dibatasi selama periode 2015-2017, Kandatel telah dan sedang melakukan pembinaan kepada 181 usaha kecil. Berdasarkan karakteristik Kota Bandung sebagai kota jasa, mitra binaan didominasi oleh bidang perdagangan, industri dan jasa. Sementara bidang lainnya; peternakan dan pertanian memiliki jumlah yang kecil sekitar 7%.

Berdasarkan Laporan Tahunan Program Kemitraan PT Telkom tahun 2016/2017, pembinaan usaha kecil di wilayah Kota Bandung masih menghadapi beberapa persoalan. Permasalahan utama dalam pembinaan usaha kecil adalah belum tercapainya indikator pemberdayaan usaha kecil khususnya usaha-usaha kecil di Kota Bandung. Indikator keberhasilan yang diterapkan oleh Kandatel Bandung terdiri dari; penambahan aset dan omzet (penjualan) serta meningkatnya jumlah tenaga kerja yang diserap usaha kecil. Dari 181 mitra binaan Kandatel Bandung hanya 25 mitra binaan yang mengalami peningkatan berdasarkan 3 indikator yang digunakan. Sementara 156 mitra binaan tidak menunjukkan peningkatan yang berarti baik pada penambahan aset, omzet maupun penambahan jumlah tenaga kerja.

Dalam periode tiga tahun, 2015-2017, Kandatel Bandung telah melakukan kemitraan dengan 559 mitra binaan di Kota Bandung. Berdasarkan Laporan program kemitraan, dalam kurun tiga tahun belum diperoleh peningkatan yang signifikan pada penyerapan tenaga kerja sebagai salah satu indikator keberhasilan pemberdayaan. Setelah menjadi mitra binaan Kandatel Bandung, kebanyakan usaha-usaha kecil mitra binaan tidak mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja. Untuk memperjelas gambaran persoalan, dijelaskan pada data penyerapan tenaga kerja pada mitra binaan akan dijelaskan pada tabel 1.3.

Tabel 3
Penyerapan Tenaga Kerja pada Mitra Binaan di Kota Bandung
Periode 2015-2017

Jenis Usaha	2015		2016		2017	
	Jumlah unit usaha	Penyerapan Tenaga Kerja	Jumlah unit usaha	Penyerapan Tenaga Kerja	Jumlah unit usaha	Penyerapan Tenaga Kerja
1. Industri	69	172	71	177	66	168
2. Perdagangan	59	149	61	154	57	144
3. Jasa	52	130	53	134	51	126
4. Peternakan dan Pertanian	6	14	6	14	7	13
Jumlah	186	465	192	480	181	453

Sumber : Laporan Program Kemitraan kandatel Bandung 2015-2017

B. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam konteks pembangunan nasional, tugas pemerintah adalah membangun lingkungan yang kondusif bagi setiap pelaku pembangunan baik sektor publik (masyarakat) ataupun sektor privat (pelaku bisnis) untuk mampu mengembangkan diri menjadi pelaku-pelaku kompetitif dalam lingkup nasional maupun global. Kondisi lingkungan yang kondusif tersebut hanya dapat diciptakan oleh kebijakan publik. Kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang dapat mendukung setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing dan tidak menjadikan setiap pelaku pembangunan terjebak ke dalam pola ketergantungan. Inilah makna dari kebijakan publik sebagai administrasi publik yang bersifat strategis dan yang menjadikan administrasi publik khususnya kebijakan publik menjadi penting pada pembangunan suatu bangsa.

Secara singkat, proses kebijakan publik terdiri dari tiga aktivitas yaitu: formulasi, implementasi serta evaluasi kebijakan. Implementasi sebagai bagian dari proses kebijakan publik merupakan tahap penting dalam proses kebijakan bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya sekedar impian yang terdokumentasikan dalam rencana pemerintah jika tidak diimplementasikan. Secara konseptual Edward III mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tahap antara formulasi kebijakan dan hasil kebijakan yang mempengaruhi masyarakat. Pengertian Edward III dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Dalam analisis implementasi kebijakan publik, penentuan variabel adalah signifikan untuk menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Edward III menjelaskan model implementasi kebijakan publik terdiri dari empat variabel yaitu:

1. Struktur birokrasi. Birokrasi merupakan lembaga yang paling dominan dalam implementasi kebijakan, sehingga struktur birokrasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Faktor-faktor dari struktur birokrasi terdiri dari :
 - a. *Standard Operational Procedure (SOP)* adalah perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas.
 - b. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab suatu implementasi kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.
2. Sumber daya diartikan sebagai suatu input dalam siklus *input-procces-output-feedback*. Sumberdaya juga mempunyai arti pengorbanan dan biaya yang dikeluarkan dalam pencapaian nilai tertentu yang ditetapkan dalam output kebijakan. Edward III (1980:11) mengategorikan sumber daya organisasi terdiri dari : "*Staff, information, authority, facilities; building, equipment, land and supplies*".
3. Disposisi merupakan kecenderungan atau sikap organisasi pelaksana terhadap implementasi kebijakan. Disposisi dapat berupa penerimaan, penolakan atau sikap apathis. Beberapa faktor yang mempengaruhi disposisi yaitu pengangkatan birokrasi dan insentif yang diberikan kepada para implementor kebijakan.
4. Komunikasi. Komunikasi dalam implementasi kebijakan publik merupakan pengelolaan proses informasi yang terdiri dari; pemberi informasi (*informan*), isi informasi dan penerima informasi serta umpan balik- yang efektif perlu yang dibangun dan dikembangkan melalui saluran-saluran komunikasi yang efektif. Menurut Edward III dalam Leo Agustino (2006:157-158) terdapat tiga unsur komunikasi dalam implementasi kebijakan yaitu: tranmisi, kejelasan informasi dan konsistensi.

Secara umum kebijakan diarahkan pada pemecahan masalah publik dan atau pencapaian tujuan. Salah-satu bentuk pencapaian tujuan kebijakan adalah pemberdayaan masyarakat. Seiring dengan tujuan tersebut, kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai standar dan pemaksa yang menjamin adanya kesempatan bagi setiap orang, melainkan juga mampu menyediakan ruang bagi pemberdayaan masyarakat, baik dalam proses perumusan, strategi-strategi implementasi maupun muatan-muatan program di dalamnya

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan bermakna suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh kemampuan dari pihak yang memiliki kekuasaan kepada pihak yang kurang memiliki kemampuan atau kekuasaan.

Secara spesifik Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 1997 (1997:2) mendefinisikan pemberdayaan usaha kecil sebagai upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya

menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pemberdayaan usaha kecil tidak akan terlepas dari kebijakan-kebijakan yang diberlakukan dan dijalankan pemerintah, karena suatu aktivitas pemberdayaan mensyaratkan keterlibatan kemitraan yang mengandung unsur pemerintah, sektor privat atau swasta serta masyarakat. Aspek-aspek pemberdayaan menurut Winarni dalam Ambar T.S. (2004:79) meliputi tiga hal yaitu:

1. *Enabling* atau pengembangan adalah penciptaan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk mengembangkan potensinya.
2. *Empowerment* atau memperkuat potensi atau daya adalah upaya membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi serta penyadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta berupaya mengembangkannya.
3. Serta terciptanya kemandirian. Kemandirian adalah aktivitas yang menghindari ketergantungan tetapi mengarahkan pada kemandirian masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1997, pasal 4, menjelaskan secara khusus mengenai tujuan pemberdayaan usaha kecil yaitu:

1. Menumbuhkan dan meningkatkan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.
2. Meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan ekspor, serta meningkatkan dan pemertaaan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional.

Pada dasarnya, kemitraan usaha ini menjangkau pengertian yang luas yang berlangsung antara pelaku ekonomi yang meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, koperasi, usaha berskala besar, menengah dan kecil yang bersifat terbuka dan menjangkau segala sektor dalam kegiatan ekonomi.

Upaya mewujudkan struktur ekonomi yang semakin seimbang dan kuat membutuhkan peran yang lebih besar dari usaha kecil sebagai kegiatan ekonomi rakyat, yang sebenarnya masih sangat memerlukan iklim usaha yang kondusif, pembinaan dan pengembangan. Untuk itu, diperlukan perhatian yang lebih besar untuk mengarahkan kemitraan usaha antara usaha besar dan usaha menengah dengan usaha kecil. Secara prinsip, kemitraan usaha tetap diarahkan dapat berlangsung atas dasar norma-norma ekonomi yang berlaku serta adanya kebutuhan dalam keterkaitan usaha yang saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan. Kemitraan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1997, pasal 1 butir 8, menyebutkan bahwa kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Berkaitan dengan pemberdayaan usaha kecil yang masih menghadapi berbagai masalah, maka dibutuhkan penyelenggaraan kebijakan publik yang melibatkan sumber-sumber potensial. Pemberdayaan usaha kecil menuntut adanya keterlibatan sumber-sumber potensial secara komprehensif. Menteri Pendayagunaan BUMN memutuskan melibatkan perusahaan-perusahaan BUMN sebagai perusahaan besar nasional yang memiliki potensi dalam pemberdayaan usaha kecil sekaligus mempunyai tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat luas. Keputusan Menteri Nomor

236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan manifestasi kebijakan publik dengan cara mengorganisasikan perusahaan-perusahaan BUMN dalam memberdayakan usaha kecil dengan program kemitraan BUMN.

C. METODE PENELITIAN

Berdasarkan karakteristik penelitian yang menjelaskan pengaruh variabel serta pengujian hipotesis antara variabel-variabel yang ada dengan menggunakan teknik sampling, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, secara lebih spesifik menggunakan metode survei eksplanatif (*explanatory survey*). Langkah-langkah yang lazim ditempuh dalam pelaksanaan survei adalah (Singarimbun, 1989:13):

1. Merumuskan masalah penelitian dan menentukan tujuan survei.
2. Menentukan konsep dan hipotesis serta menggali kepustakaan.
3. Pengambilan sampel.
4. Pembuatan kuesioner atau angket.
5. Pekerjaan lapangan; pengumpulan data lapangan.
6. Pengolahan data
7. Analisa dan pelaporan.

Seperti yang dijelaskan Masri Singarimbun (1989:1), penelitian survei menitikberatkan pada penelitian relasional yang mempelajari hubungan-hubungan variabel, sehingga secara langsung atau tidak langsung dilakukan pengujian hipotesis. "Survei eksplanatif adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis". (Masri Singarimbun, 1989:3). Secara praktis Singarimbun menyebutkan, "penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner atau angket sebagai alat pengumpulan data yang pokok".

Berdasarkan karakteristik penelitian, jenis analisis statistik yang digunakan adalah teknik statistik inferensial, yaitu analisis statistik yang tidak hanya mendeskripsikan sebuah perhitungan data, namun juga analisis statistik yang menjelaskan atau melakukan pengujian atas hubungan atau pengaruh diantara kumpulan-kumpulan data penelitian. Sehingga diperoleh penjelasan hubungan kausal antara kumpulan data yang telah dianalisis.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah menentukan populasi yang diikuti dengan pengambilan ukuran sampel yang representatif. Tahap berikutnya adalah pengujian instrumen penelitian berupa kuesioner atau angket. Pengujian instrumen dilakukan dengan uji validitas (ketepatan) untuk mengetahui kesahihan alat ukur agar instrumen layak untuk digunakan. Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan uji intrinsek konsistensi yang dilakukan untuk mengetahui konsistensi penilaian yang diberikan terhadap setiap item pertanyaan yang pada esensinya untuk mengetahui keterandalan instrumen.

Karena masalah yang akan diteliti adalah pengaruh, maka analisis yang akan digunakan adalah Path Analysis atau analisis jalur, yang pada dasarnya adalah analisis korelasi. Aturan pokok analisis jalur adalah korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat adalah jumlah dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Analisis jalur ini digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel implementasi program kemitraan PT Telkom terhadap variabel pemberdayaan mitra binaan usaha kecil di Kota Bandung.

D. PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama dari hipotesis penelitian yaitu seberapa besar pengaruh implementasi program kemitraan terhadap pemberdayaan usaha kecil. Untuk itu, bagian ini memaparkan pengujian pengaruh dari implementasi kebijakan program kemitraan PT Telkom yang terdiri dari; pengaruh implementasi program kemitraan PT Telkom (X) terhadap pemberdayaan mitra binaan di Kota Bandung (Y). Kemudian diturunkan pada pengujian setiap sub variabel yang terdiri dari; sub variabel struktur birokrasi (X_1), sumber daya (X_2), disposisi (X_3) dan komunikasi (X_4) terhadap pemberdayaan mitra binaan PT Telkom (Y) dengan menggunakan analisis jalur (*Path Analysis*).

Sesuai dengan prosedur perhitungan statistik pada Bab III, sebelum melangkah ke analisis jalur, terlebih dahulu dilakukan analisis hubungan antara sesama variabel bebas (struktur birokrasi, sumber daya, disposisi, dan komunikasi).

Tabel 4

Matriks Korelasi Antar Variabel Bebas

	X_1	X_2	X_3	X_4
X_1	1,0000			
X_2	0,5948*	1,0000		
X_3	0,6156*	0,5122*	1,0000	
X_4	0,5249*	0,4868*	0,4749*	1,0000

*korelasi signifikan pada level 1%

Berdasarkan nilai koefisien korelasi pada tabel diatas dapat dilihat hubungan yang paling kuat diantara keempat sub variabel implementasi program kemitraan PT Telkom adalah antara sub variabel struktur birokrasi dengan sub variabel disposisi, kemudian hubungan antara sub variabel struktur birokrasi dengan sub variabel sumber daya. Sebaliknya hubungan yang paling lemah yang ditemukan diantara keempat sub variabel implementasi kebijakan program kemitraan PT Telkom adalah antara sub variabel disposisi dengan sub variabel komunikasi, kemudian hubungan antara sub variabel sumber daya dengan sub variabel komunikasi.

Setelah dianalisis hubungan diantara sesama sub variabel bebas, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis jalur. Berdasarkan paradigma penelitian maka secara matematis hubungan struktural antara keempat sub variabel implementasi program kemitraan PT Telkom dengan pemberdayaan mitra binaan Kandatel Bandung yang berdomisili di Kota Bandung dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = P_{YX1}X_1 + P_{YX2}X_2 + P_{YX3}X_3 + P_{YX4}X_4 + \varepsilon$$

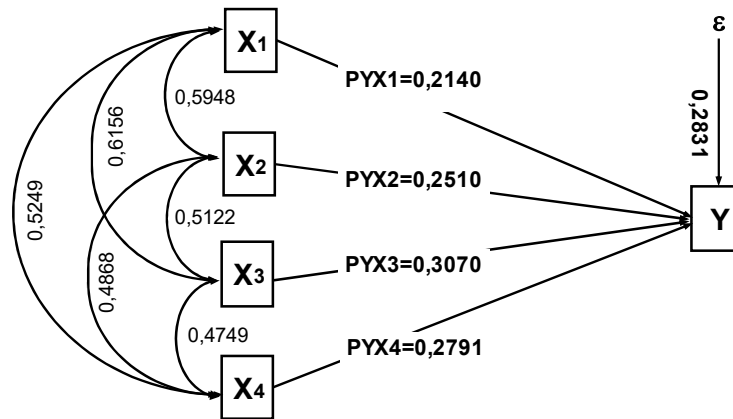
Pada model persamaan struktur diatas terlihat dengan jelas bahwa pemberdayaan mitra binaan PT Telkom yang berdomisili di wilayah Kota Bandung yang diberi simbol Y merupakan akibat dari perubahan nilai-nilai dari keempat sub variabel implementasi program kemitraan PT Telkom yang diberi simbol X_1 , X_2 , X_3 dan X_4 . Dari hasil pengolahan data menggunakan bantuan program SPSS 15 diperoleh koefisien jalur dari masing-masing sub variabel implementasi kebijakan program kemitraan PT Telkom seperti yang dijabarkan pada tabel 4.13.

Tabel 5
Koefisien Jalur Parsial Implementasi Program Kemitraan PT Telkom

Sub variabel	Koefisien Jalur	t _{hitung}	R² = 0,7169
X₁	2,1368	2,0017	
X₂	2,7448	2,0017	
X₃	3,3152	2,0017	
X₄	3,2354	2,0017	

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017.

Gambar 1
Diagram Jalur Pengaruh Variabel X Terhadap Variabel Y



Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017.

Berdasarkan nilai koefisien determinasi (R^2) diketahui bahwa secara bersama-sama keempat sub variabel implementasi kebijakan program kemitraan PT Telkom (struktur birokrasi, sumber daya, disposisi dan komunikasi) memberikan pengaruh sebesar 71,69% dalam menentukan perubahan pada pemberdayaan mitra binaan di wilayah Kota Bandung (nilai R^2). Sementara sisanya sebesar 28,31% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar keempat sub variabel (*epsilon*) implementasi program kemitraan PT Telkom.

Tabel 6
Jumlah Pengaruh Parsial Sub Variabel X Terhadap Variabel Y

Sub-Variabel	Besarnya Pengaruh		Total Pengaruh
	Langsung	Tidak langsung	
Struktur birokrasi	4,58%	10,37%	14,95%
Sumber daya	6,30%	10,55%	16,85%
Disposisi	9,42%	12,06%	21,48%
Komunikasi	7,79%	10,62%	18,41%
Pengaruh Simultan =			71,69%

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017.

1. Pengaruh Implementasi Program Kemitraan PT Telkom Terhadap Pemberdayaan Mitra Binaan Di Kota Bandung.

Setelah dihitung besar pengaruh dari keempat sub variabel implementasi kebijakan program kemitraan PT Telkom (struktur birokrasi, sumber daya, disposisi dan komunikasi) secara bersama-sama terhadap pemberdayaan usaha kecil di Kota Bandung, selanjutnya akan diuji apakah keempat sub variabel implementasi kebijakan program kemitraan PT Telkom tersebut berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan mitra binaan di Kota Bandung, baik secara bersama-sama maupun secara parsial.

Hipotesis:

$H_{o1} : \rho_{YX_i} = 0$
 $i = 1, \dots, 4$
 Implementasi program kemitraan PT Telkom yang ditentukan oleh struktur birokrasi, sumber daya, disposisi dan komunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan usaha kecil.

$H_{a1} : \rho_{YX_i} \neq 0$
 $i = 1, \dots, 4$
 Implementasi program kemitraan PT Telkom yang ditentukan oleh struktur birokrasi, sumber daya, disposisi dan komunikasi berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan usaha kecil.

Tabel 7
 Uji Signifikansi Pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y

R^2	F _{-hitung}	F _{-tabel (db: 4;58)}	H_{o1}	H_{a1}
0,7169	36,7132	2,5307	Ditolak	Diterima

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2008.

Berdasarkan hasil pengujian seperti dijabarkan pada tabel 4.15 dapat dilihat nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% ada alasan yang kuat untuk menolak H_{o1} dan menerima H_{a1} . Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa implementasi program kemitraan PT Telkom yang terdiri dari 4 sub variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan usaha kecil di wilayah Kota Bandung.

2. Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Pemberdayaan Mitra Binaan Di Kota Bandung.

Pada pengujian secara bersama-sama menyimpulkan bahwa keempat sub variabel implementasi program kemitraan PT Telkom secara bersama-sama berpengaruh signifikan dalam meningkatkan pemberdayaan usaha kecil di wilayah Kota Bandung, selanjutnya dilakukan pengujian secara parsial untuk menguji kebermaknaan pengaruh parsial masing-masing sub variabel implementasi program kemitraan PT Telkom. Untuk menguji pengaruh parsial masing-masing sub variabel implementasi program kemitraan PT Telkom digunakan statistik uji t yang dibandingkan dengan nilai t dari tabel pada tingkat kekeliruan 5% dan derajat bebas 58 yaitu sebesar 2,0017.

Hipotesis:

$H_{02} : \rho_{YX_1} = 0$ Secara parsial implementasi program kemitraan PT Telkom pada sub variabel struktur birokrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan usaha kecil di Kota Bandung.

$H_{a2} : \rho_{YX_1} \neq 0$ Secara parsial implementasi program kemitraan PT Telkom pada sub variabel struktur birokrasi berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan usaha kecil di Kota Bandung.

Tabel 8
Uji Signifikansi Pengaruh Struktur Birokrasi Terhadap Pemberdayaan Mitra Binaan di Kota Bandung

Koefisien Jalur	t _{hitung}	t _{tabel (db:58)}	H ₀₂	H _{a2}
0,2140	2,1368	2,0017	Ditolak	diterima
Pengaruh Langsung = 4,58%	Pengaruh Tidak Langsung = 10,37%		Total Pengaruh = 14,95%	

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017

Berdasarkan hasil pengujian seperti dijabarkan pada table 4.16 dapat dilihat nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% ada alasan yang kuat untuk menolak H_{02} dan menerima H_{a2} . Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa implementasi program kemitraan PT Telkom pada sub variabel struktur birokrasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan mitra binaan di Kota Bandung .

Secara langsung implementasi program kemitraan PT Telkom pada sub variabel struktur birokrasi memberikan pengaruh sebesar 4,58% terhadap pemberdayaan mitra binaan di Kota Bandung, dan secara tidak langsung karena hubungannya dengan tiga sub variabel lainnya sebesar 10,37%. Secara total implementasi program kemitraan PT Telkom pada sub variabel struktur birokrasi memberikan pengaruh sebesar 14,95% terhadap pemberdayaan mitra binaan di Kota Bandung.

Seperti yang diungkapkan Ripley dan Franklin bahwa "*Bureaucracies are dominant in the implementation of programs and policies and have varying degrees of importance in other stages of the policy process. In policy and program formulation and legitimation activities, bureaucratic units play a large role, although they are not dominant*". Dalam sebuah pelaksanaan kebijakan, birokrasi memiliki peranan yang dominan jika dibandingkan pada tahap formulasi yang memiliki peran yang luas namun tidak dominan. Dalam pelaksanaan program kemitraan PT Telkom, peran struktur birokrasi yang terdiri dari CDC pusat, CDC Divreg Jabar dan Banten serta CDC Kandatel Bandung mempunyai peranan dominan. Tanpa adanya struktur birokrasi terdapat kemungkinan besar program kemitraan tidak akan berjalan dengan optimal.

Struktur birokrasi dalam implementasi program kemitraan secara sengaja (*by design*) diciptakan untuk hanya menjalankan program PKBL yang di dalamnya terdapat program kemitraan melalui Keputusan Direksi PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Nomor: KD61.PS150.CTG-10.2003 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Hal tersebut seiring dengan pendapat Ripley dan Franklin bahwa birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*).

Dalam pelaksanaan suatu program kebijakan, struktur birokrasi mensyaratkan adanya *Standard operational procedure* (SOP). Menurut Edward III fungsi SOP adalah untuk mengorganisasikan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini. Artinya bahwa SOP diperlukan untuk menangani pekerjaan rutin yang bersifat seragam pada beberapa level yang berbeda agar pekerjaan pelayanan publik dapat berjalan prima. SOP yang ditetapkan dalam program kemitraan didasarkan pada Keputusan Direksi PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Nomor: KD 51/KU200/PUK-00/2003 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Melalui Kepdir ini, setiap level birokrasi memiliki legalitas dalam menjalankan prosedur-prosedur program kemitraan. Disamping itu, melalui keberadaan SOP ini dapat dikembangkan suatu inovasi kerja (prosedur) guna menyesuaikan dengan lingkungan kerja yang berbeda tanpa keluar dari koridor kerja yang ada.

Faktor penting lainnya dari struktur birokrasi adalah fragmentasi. Edward III menjelaskan bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi". Logika yang dikembangkan mengenai fragmentasi adalah semakin besar fragmentasi yang dikembangkan semakin berkurang efektivitas pelaksanaan kebijakan. Fragmentasi birokrasi yang terdapat dalam program kemitraan hanya terdiri dari 3 level yaitu pusat, wilayah dan daerah. Setiap level birokrasi diisi oleh struktur yang ramping, sehingga menghasilkan fragmentasi yang kecil. Dengan begitu, pelaksanaan program kemitraan dapat dilaksanakan secara efektif.

3. Pengaruh Sumber Daya Terhadap Pemberdayaan Mitra Binaan Di Kota Bandung

Hipotesis:

- $H_{03} : \rho_{YX_2} = 0$ Secara parsial implementasi program kemitraan PT Telkom pada sub variabel sumber daya tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan mitra binaan di Kota Bandung .
- $H_{a3} : \rho_{YX_2} \neq 0$ Secara parsial implementasi program kemitraan PT Telkom pada sub variabel sumber daya berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan mitra binaan di Kota Bandung .

Tabel 9
Uji Signifikansi Pengaruh Sumber Daya Terhadap Pemberdayaan Mitra Binaan di Kota Bandung

Koefisien Jalur	t_{hitung}	$t_{tabel} (db:58)$	H_{03}	H_{a3}
0,2510	2,7448	2,0017	Ditolak	Diterima
Pengaruh Langsung = 6,30%		Pengaruh Tidak Langsung = 10,55%		Total Pengaruh = 16,85%

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017.

Berdasarkan hasil pengujian seperti dijabarkan pada tabel diatas dapat dilihat nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% ada alasan yang kuat untuk menolak H_{03} dan menerima H_{a3} . Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa

implementasi program kemitraan PT Telkom pada sub variabel sumber daya secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan mitra binaan di Kota Bandung .

Secara langsung implementasi program kemitraan PT Telkom pada sub variabel sumber daya memberikan pengaruh sebesar 6,30% terhadap pemberdayaan mitra binaan di Kota Bandung dan secara tidak langsung karena hubungannya dengan tiga sub variabel lainnya sebesar 10,55%. Secara total implementasi program kemitraan PT Telkom pada sub variabel sumber daya memberikan pengaruh sebesar 16,85% terhadap pemberdayaan mitra binaan di Kota Bandung.

Edward III (1980:1) mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan; *“Insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided and reasonable regulation will not be developed”*. Berdasarkan teori tersebut, program kemitraan telah memiliki dan memenuhi kebutuhan sumber daya yang terdiri dari kuantitas, kualitas personil, fasilitas, dana serta informasi. Dengan begitu, sumber daya memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap pemberdayaan mitra binaanya. Walaupun terdapat persepsi dari beberapa staf CDC Kandatel yang menganggap kuantitas personil masih belum mencukupi secara optimal.

Berdasarkan fungsinya sumber daya menurut Tachjan di bagi ke dalam dua fungsi yaitu fungsi ekonomi dan teknologi. Secara ekonomis, sumber daya yang dimiliki program kemitraan seperti hasil laba sebesar 1-3% yang dialokasikan untuk program kemitraan, otoritas yang dibangun, informasi yang dikelola, personil yang disediakan dan fasilitas yang disediakan dijadikan pengorbanan oleh PT Telkom (*cost center*) dalam mewujudkan PT Telkom sebagai perusahaan yang mengaplikasikan *good coporate citizenship*. Secara teknologis, berbagai teknik yang maju mulai dari sistem komputerisasi, teknik pengelolaan pinjaman usaha, strategi pelatihan bagi mitra binaan, serta mekanisme kerja (SOP) merupakan alat dan pendekatan untuk mentransformasikan sumber daya menuju tujuan-tujuan organisasi.

4. Pengaruh Disposisi Terhadap Pemberdayaan Mitra Binaan Di Kota Bandung.

Hipotesis:

$H_{04} : \rho_{YX_3} = 0$ Secara parsial implementasi program kemitraan PT Telkom pada sub variabel disposisi tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan mitra binaan di Kota Bandung.

$H_{a4} : \rho_{YX_3} \neq 0$ Secara parsial implementasi program kemitraan PT Telkom pada sub variabel disposisi berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan mitra binaan di Kota Bandung.

Tabel 10

Uji Signifikansi Pengaruh Disposisi Terhadap Pemberdayaan Mitra Binaan di Kota Bandung

Koefisien Jalur	t_{hitung}	$t_{tabel} (db:58)$	H_{04}	H_{a4}
0,3070	3,3152	2,0017	Ditolak	diterima
Pengaruh Langsung = 9,42%		Pengaruh Tidak Langsung = 12,06%		Total Pengaruh = 21,48%

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017

Berdasarkan hasil pengujian seperti dijabarkan pada tabel diatas dapat dilihat nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% ada alasan yang kuat untuk menolak H_{04} dan menerima H_{a4} . Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa implementasi program kemitraan PT Telkom pada sub variabel disposisi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan mitra binaan di Kota Bandung.

Secara langsung implementasi program kemitraan PT Telkom pada sub variabel disposisi memberikan pengaruh sebesar 9,42% terhadap pemberdayaan mitra binaan di Kota Bandung dan secara tidak langsung karena hubungannya dengan tiga sub variabel lainnya sebesar 12,06%. Secara total implementasi program kemitraan PT Telkom pada sub variabel disposisi memberikan pengaruh sebesar 21,48% terhadap pemberdayaan mitra binaan di Kota Bandung.

Edward III mengemukakan kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Sebaliknya, jika para pelaksana mempunyai kecenderungan negatif atau adanya penolakan terhadap implementasi kebijakan, maka besar kemungkinan implementasi kebijakan berjalan tidak efektif. Melihat tanggapan berdasarkan angket, observasi dan wawancara diperoleh hasil sikap yang positif dari para pelaksana program kemitraan yang terdiri dari CDC pusat, CDC Divreg Jabar dan Banten serta CDC kandatel Bandung. Sehingga memberikan pengaruh yang positif terhadap pemberdayaan mitra binaan.

5. Pengaruh Komunikasi Terhadap Pemberdayaan Mitra Binaan Di Kota Bandung.

Hipotesis:

$H_{05} : \rho_{YX_4} = 0$ Secara parsial implementasi program kemitraan PT Telkom pada sub variabel komunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan mitra binaan di Kota Bandung.

$H_{a5} : \rho_{YX_4} \neq 0$ Secara parsial implementasi program kemitraan PT Telkom pada sub variabel komunikasi berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan mitra binaan di Kota Bandung.

Tabel 11
Uji Signifikansi Pengaruh Komunikasi Terhadap Pemberdayaan Mitra Binaan Di Kota Bandung

Koefisien Jalur	t_{hitung}	$t_{tabel} (db:58)$	H_{05}	H_{a5}
0,2791	3,2354	2,0017	Ditolak	diterima
Pengaruh Langsung = 7,79%		Pengaruh Tidak Langsung = 10,62%		Total Pengaruh = 18,41%

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017

Berdasarkan hasil pengujian seperti dijabarkan pada tabel diatas dapat dilihat nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% ada alasan yang kuat untuk menolak H_{05} dan menerima H_{a5} . Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa

implementasi program kemitraan PT Telkom pada sub variabel komunikasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan mitra binaan di Kota Bandung.

Secara langsung implementasi program kemitraan PT Telkom pada sub variabel komunikasi memberikan pengaruh sebesar 7,79% terhadap pemberdayaan mitra binaan yang berdomisili di Kota Bandung dan secara tidak langsung karena hubungannya dengan tiga sub variabel lainnya sebesar 10,62%. Secara total implementasi program kemitraan PT Telkom pada sub variabel komunikasi memberikan pengaruh sebesar 18,41% terhadap pemberdayaan mitra binaan di Kota Bandung.

Komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Komunikasi pada program kemitraan merupakan sub variabel yangterkecil dalam mempengaruhi pemberdayaan mitra binaan. Hal tersebut dikarenakan indikator-indikator komunikasi belum terpenuhi secara optimal seperti adanya transmisi informasi yang mengakibatkan kurang jelasnya informasi yang diberikan PT Telkom kepada mitra binaan, intensitas informasi yang diberikan juga nilai belum maksimal berkaitan dengan kurangnya konsentrasi yang diberikan pada bidang komunikasi. Namun, secara umum, komunikasi telah terjadi komunikasi yang terjalin walaupun dinilai belum optimal. Kondisi komunikasi yang demikian berpengaruh kecil pada pemberdayaan mitra binaan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, penelitian ini menghasilkan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi program kemitraan PT. Telkom berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan usaha kecil di Kota Bandung yang ditentukan oleh struktur birokrasi, sumber daya, disposisi dan komunikasi. Pengaruh yang signifikan ini didasarkan pada hasil angket yang membuktikan anggapan yang positif dari pelaksanaan program kemitraan oleh CDC Kandatel Bandung dan anggapan yang positif tentang pemberdayaan mitra binaan di Kota Bandung. Berdasarkan analisis data yang dilakukan diperoleh hubungan (korelasi) yang kuat dan memberikan pengaruh yang positif antara implementasi program kemitraan PT Telkom terhadap pemberdayaan usaha kecil yang menjadi mitra binaan Kandatel Bandung.
2. Struktur birokrasi dari implementasi program kemitraan berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan usaha kecil yang ditentukan oleh prosedur program kemitraan, lapisan birokrasi, pembagian kerja dan spesialisasi kerja. Berdasarkan hasil angket, sebagian besar berpendapat bahwa pelaksanaan program kemitraan pada sub variabel struktur birokrasi telah dijalankan dengan baik dengan indikator adanya SOP yang jelas, lapisan birokrasi yang pendek, terdapat pembagian dan spesialisasi kerja yang jelas pada staf program kemitraan. Pelaksanaan struktur birokrasi tersebut berpengaruh positif terhadap pemberdayaan mitra binaan di Kota Bandung.
3. Sumber daya dari implementasi program kemitraan berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan usaha kecil yang ditentukan oleh kuantitas staf, kemampuan staf, dana, otoritas, fasilitas serta informasi kegiatan. Berdasarkan

hasil angket, sebagian besar berpendapat bahwa pelaksanaan program kemitraan pada sub variabel sumber daya telah dijalankan dengan baik dengan indikator sudah memadainya sumber daya program, baik dari segi staf, wewenang dan otoritas maupun dari segi ketersediaan dana serta data dan informasi.

4. Disposisi dari implementasi program kemitraan berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan usaha kecil yang ditentukan oleh keramahan pelaksana, disiplin pelaksana, pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan kepatuhan pelaksana terhadap peraturan. Berdasarkan hasil angket, sebagian besar berpendapat bahwa pelaksanaan program kemitraan pada sub variabel disposisi telah dijalankan dengan baik dengan indikator sikap yang ramah dalam memberikan pelayanan, disiplin dalam menjalankan tugas-tugas, menjalankan kewajiban dengan baik serta ketaatan pada aturan program kemitraan usaha kecil.
5. Komunikasi dari implementasi program kemitraan berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan usaha kecil yang ditentukan oleh sosialisasi, kejelasan informasi, konsistensi informasi, frekwensi komunikasi, dan lapisan komunikasi. Berdasarkan hasil angket, sebagian besar berpendapat bahwa pelaksanaan program kemitraan pada sub variabel komunikasi berjalan baik, hanya saja masalah frekuensi penyampaian informasi yang masih kurang dan informasi yang sampai pada pengusaha kecil tidak secara langsung melainkan melalui beberapa orang atau lembaga.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Anatan, L. Corporate Social Responsibility (CSR): *Tinjauan Teoritis dan Praktis di Indonesia*. Jurnal Jurusan Manajemen – Universitas Kristen Maranatha, Vol. 8, No. 2. Hal 5. (<http://majaour.maranatha.edu>)
- Budimanta, A., A. Prasetyo dan B. Rudianto. 2004. *Corporate Social Responsibility*. Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD). Jakarta
- Darwin, A. 2008. *CSR Itu Tidak Ubahnya Seperti Sedekah*. Majalah Akuntan Indonesia Edisi No. 12/Tahun II/Oktober 2008 Halaman 17-18. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Elkington, J. 1998. *Cannibals With Forks: The Tripple Bottom Line in 21st Century Business*. BC: New Society Publishers. Gabriola Island.
- Glautier, M.W.E. and B. Underdown. 1986. *Accounting Theory and Practice*. Third Edition. Pitman Publishing. London.
- Hadi, N. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.